

	News Title : Satgas Waspada Investasi Minta Masyarakat Waspada Tawaran Binary Option dan Broker Ilegal	
	Media Name : kabarpolitik.com	Journalist : (HUMAS OJK/UN)
	Publish Date : 19 February 2022	Tonality : Positive
	News Page : 1	News Value : 1,500,000
	Resources : Tongam L. Tobing (Ketua SWI)	Ads Value : 500,000
	Section/Rubrication : Pemerintahan	Topic : binary option

PEMERINTAHAN

Satgas Waspada Investasi Minta Masyarakat Waspada Tawaran Binary Option dan Broker Ilegal



Published 2 menit ago on 19 Februari 2022
By Galih



Satuan Tugas Waspada Investasi (Satgas SWI) meminta masyarakat untuk mewaspada penawaran *binary option* dan broker ilegal yang tidak terdaftar di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan yang dilakukan oleh afiliasi atau *influencer* yang berpotensi merugikan masyarakat.

"Kegiatan perdagangan *online* yang dilakukan *binary option* itu ilegal karena bersifat judi, tidak ada barang yang diperdagangkan. Sifatnya hanya untung-untungan. Menang atau kalah dalam menebak harga suatu komoditi dan naik atau turunnya dalam periode tertentu, yang bisa merugikan masyarakat," kata Ketua SWI Tongam L. Tobing, dikutip dari laman resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Sabtu (19/02/2022).

Untuk melindungi masyarakat dari kerugian yang timbul, SWI telah memanggil sejumlah afiliasi dan *influencer* yaitu Indra Kesuma, Doni Muhammad Taufik, Vincent Raditya, Erwin Laisuman, dan Kenneth William yang diduga telah memfasilitasi produk *binary option* dan broker ilegal yang tidak terdaftar di Bappebti seperti Binomo, Olymptrade, Quotex, dan Octa FX serta melakukan kegiatan pelatihan perdagangan tanpa izin.

LATEST

TRENDING

VIDEOS



PEMERINTAHAN / 2 menit ago
Satgas Waspada Investasi Minta Masyarakat Waspada Tawaran Binary Option dan Broker Ilegal



PEMERINTAHAN / 31 menit ago
Belum Dapat WA Isoman? Hubungi Whatsapp Kemenkes di 081110500567



INTERNASIONAL / 4 jam ago
Joe Biden Perpanjang Status Darurat Nasional di AS Akibat Covid-19



INTERNASIONAL / 5 jam ago
Dubes Vorobieva: NATO Langgar Janji, Rusia Sangat Menentang Ekspansi



PEMERINTAHAN / 6 jam ago
Presiden Jokowi Tandatangani PP 8/2022 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji



CEK FAKTA / 7 jam ago
Turn Back Hoax: Kami menahan 64 orang aksi radikalisme anarkis warga Wadas purworejo, yang ganggu proyek PT. Beijing Xi Wen" – TurnBackHoax.ID



PEMERINTAHAN / 17 jam ago
Mendag Minta Distributor Salurkan Minyak Goreng Secara Cepat dan Masif



CEK FAKTA / 18 jam ago
Turn Back Hoax: Seorang Petugas PLN di Nguling Pasuran Terserum dan Terbakar di Tiang Listrik – TurnBackHoax.ID

Dalam pertemuan virtual dengan para *influencer* tersebut, SWI meminta agar mereka menghentikan kegiatan promosi dan pelatihan *trading* serta menghapus semua konten promosi dan pelatihan *trading* yang ada di media sosial masing-masing. Hadir dalam pertemuan itu, anggota SWI dari Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, OJK, Bappebti Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Selain persoalan *binary option*, SWI dalam kegiatan penindakannya juga telah menghentikan kegiatan 21 entitas yang diduga melakukan kegiatan usaha tanpa izin dari otoritas yang berwenang dan berpotensi merugikan masyarakat. Entitas tersebut melakukan kegiatan ilegal sebagai berikut: 16 kegiatan *money game*, 3 perdagangan aset kripto tanpa izin, dan 2 perdagangan *robot trading* tanpa izin.

Menurut Tongam, belakangan ini marak penawaran investasi berbasis *website* ataupun aplikasi yang harus diwaspadai karena pelakunya memanfaatkan ketidakpahaman masyarakat untuk menipu dengan cara iming-iming pemberian imbal hasil yang sangat tinggi dan tidak wajar, namun terlebih dahulu masyarakat diminta menempatkan atau menyetorkan dananya.

SWI meminta masyarakat agar sebelum melakukan investasi untuk memahami sejumlah hal. Pertama, memastikan pihak yang menawarkan investasi tersebut memiliki perizinan dari otoritas yang berwenang sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan. Kedua,

memastikan pihak yang menawarkan produk investasi, memiliki izin dalam menawarkan produk investasi atau tercatat sebagai mitra pemasar. Juga, memastikan jika terdapat pencantuman logo instansi atau lembaga pemerintah dalam media penawarannya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pinjama Online (Pinjol) Ilegal

SWI dalam tugasnya melindungi masyarakat kembali menemukan dan menutup 50 entitas pinjaman *online* ilegal yang beredar melalui aplikasi di telepon genggam dan di *website* yang dapat merugikan masyarakat.

“Sejalan dengan penegakan hukum yang dilakukan Kepolisian dengan menangkap pelaku pinjol ilegal, kami terus melakukan pencegahan melalui patrol siber dan menutup entitas pinjol ilegal yang kembali kami temukan,” kata Tongam.

Menurut Ketua SWI, pemberantasan pinjol ilegal memerlukan kerja sama dari seluruh pihak, terutama masyarakat agar jangan mengakses pinjol ilegal yang bisa merugikan. Masyarakat yang membutuhkan dana untuk keperluan produktif diminta meminjam pada *fintech lending* yang berizin di OJK.

SWI yang terdiri dari 12 kementerian dan lembaga terus berupaya memberantas kegiatan pinjol ilegal dengan meningkatkan literasi masyarakat dengan menyebarkan konten-konten edukasi terhadap bahaya pinjol ilegal.

Sejak tahun 2018 hingga Februari ini, Satgas sudah menutup sebanyak 3.784 pinjol Ilegal. Satgas juga mendorong penegakan hukum kepada para pelaku pinjaman *online* ilegal ini dengan terus menerus juga melakukan pemblokiran situs dan aplikasi agar tidak diakses oleh masyarakat..

Tidak hanya kegiatan pinjol ilegal dan kegiatan investasi ilegal, Satgas Waspada Investasi juga menemukan lima usaha pergadaian swasta ilegal yang dilakukan tanpa izin dari OJK sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian (POJK). Sejak tahun 2019 hingga Februari 2022 Satgas sudah menutup sebanyak 165 kegiatan pergadaian ilegal.

“Satgas Waspada Investasi meminta kepada masyarakat untuk tidak bertransaksi dengan usaha gadai swasta yang ilegal dan jika ingin melakukan transaksi dengan kegiatan usaha gadai agar dapat menggunakan usaha gadai yang terdaftar di OJK,” tandas Tongam. (HUMAS OJK/UN)